

## KEPUTUSAN KEPALA DESA DAYEUHLUHUR NOMOR 20 TAHUN 2024

### **TENTANG**

# PANITIA PELAKSANA KEGIATAN (PPK) DI DESA DAYEUHLUHUR KECAMATAN JATINAGARA TAHUN 2025

### dsdayeuhluhur@gmail.com

dayeuhluhur.desa.id

RT 001 RW 001 Dusun Desa Desa

Dayeuhluhur 46273





#### KABUPATEN CIAMIS

#### KEPUTUSAN KEPALA DESA DAYEUHLUHUR NOMOR : 20 TAHUN 2024

#### **TENTANG**

## PENATAPAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN (PPK) DI DESA DAYEUHLUHUR KECAMATAN JATINAGARA KABUPAATEN CIAMIS TAHUN 2025

#### KEPALA DESA DAYEUHLUHUR,

#### Menimbang

- a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 66 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Ciamis, dinyatakan bahwa Kepala Desa menetapkan pelaksana kegiatan dengan Keputusan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penatapan Panitia Pelaksana Kegiatan di Desa Dayeuhluhur Kecamatan Jatinagara Tahun 2025.

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- 6. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 66 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Ciamis;
- 7. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 8. Peraturan Desa Dayeuhluhur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dayeuhluhur Kecamatan Jatinagara Tahun 2021 – 2029
- 9. Peraturan Kepala Desa Dayeuhluhur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Dayeuhluhur Kecamatan Jatinagara Tahun 2025
- 10. Peraturan Desa Dayeuhluhur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dayeuhluhur Tahun Anggaran 2025

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan di Desa

Dayeuhluhur Kecamatan Jatinagara Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan

Kepala Desa ini.

KEDUA : Lampiran sebagaimana dimaksud pada DIKTUM

KESATU, merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Keputusan Kepala Desa ini.

KETIGA

Panitia Pelaksanan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertugas dan melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Membantu Kepala Desa dalam tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan dan pelaporan kegiatan;
- b. Menetapkan dokumen persiapan kegiatan/pengadaan;
- c. Menyampaikan dokumen persiapan kegiatan/pengadaan kepada TPK;
- d. Melakukan kegiatan/pengadaan sesuai dengan ambang batas nilai yang ditetapkan Musrenbangdes;
- e. Menandatangani bukti transaksi kegiatan/pengadaan;
- f. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan/pengadaan;
- g. Menerima hasil kegiatan/pengadaan;
- h. Melaporkan pengelolaan kegiatan/pengadaan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Desa; dan
- i. Menyerahkan hasil kegiatan/pengadaan pada kegiatan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Desa dengan berita acara penyerahan.

KEEMPAT

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dayeuhluhur Tahun Anggaran 2025.

KELIMA

Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Dayeuhluhur

Pada tanggal : 30 September 2024

KEPALA DESA DAYEUHLUHUR

MUMU ROHMAN

#### Tembusan:

Yth. 1. Bapak Camat Jatinagara;

2. Ketua BPD Dayeuhluhur

#### LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA DAYEUHLUHUR

Nomor : 20 TAHUN 2024 Tanggal : 30 September 2024

#### SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN DI DESA DAYEUHLUHUR KECAMATAN JATINAGARA TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DI DESA	JABATAN	JENIS KEGIATAN	KET.
1	Mumu Rohman	Kepala Desa	Penanggungjawab	Semua Kegiatan	
2	Supyan Rahayu	Sekretaris Desa	Verifikator	Semua Kegiatan	
3	Apud	Kaur Tata Usaha dan Umum	Panitia Pelaksana Kegiatan	<ol> <li>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</li> <li>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</li> <li>Penyediaan Tunjangan BPD</li> <li>Penyediaan Insentif RT/RW</li> <li>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Dana Desa</li> <li>Jasa Langganan Internet (Wifi)</li> <li>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa</li> <li>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa</li> <li>Penyediaan Operasional BPD</li> <li>Penyediaan Sarana (Aset Tetap)         <ul> <li>Perkantoran/Pemerintahan</li> <li>Pembuatan Cetak Konten Media Luar Ruang (Billboard)</li> <li>Tambahan Kesejahteraan Imam Mesjid</li> </ul> </li> </ol>	

4	Raesita Sri Lestari, SE.	Kaur Perencanaan	Panitia Pelaksana Kegiatan	1. Musyawarah Pembahasan APBDes
				2. Penyusunan RKPDes
				3. Pengelolaan Sistem Keuangan
				Desa (Siskeudes)
5	Endang	Kasi Pemerintahan	Panitia Pelaksana	1. Pelayanan Administrasi
			Kegiatan	Umum dan Kependudukan
				2. Sosialisasi dan Pemutakhiran
				IDM Desa
				3. Dukungan dan Sosialisasi
				Pelaksanaan Penjaringan dan
				Penyaringan Perangkat Desa
				4. Percepatan Pelunasan PBB
				5. Sosialisasi Administrasi
				Percepatan Pelunasan PPB-P2
				6. Digitalisasi Administrasi PBB-
				P2
				7. Koordinasi Pembinaan
				Keamanan, Ketertiban &
				Perlindungan Masyarakat
				8. Sosialisasi Penyuluhan
				Hukum
	0.1 D. 1.1.0.41	TZ ' TZ ' 1 ,	D '' D 1 1	9. Kegiatan PHBN Skala Desa
6	Sulaeman Barokah, S.Ak.	Kasi Kesejahteraan	Panitia Pelaksana	1. Renovasi Kantor Desa
			Kegiatan	2. Pemutakhiran Data SDGs
				Desa
				3. Pembangunan Gedung
				Posyandu
				4. Rabat Beton Jalan Usaha Tani
				(JUT) Blok Cipari

	5. Rabat Beton Jalan Usaha Tani
	(JUT) Blok Lempong Saron
	6. Rabat Beton Jalan Usaha Tani
	(JUT) Blok Nusa
	7. Rabat Beton Jalan Usaha Tani
	(JUT) Blok RW 009 Randegan
	8. Rabat Beton Jalan Usaha Tani
	(JUT) Jalumarat
	9. TPT Jalan Cilengkeng Dusun
	Desa
	10.TPT Jalan Cimuntur RT 006
	Dusun Desa
	11.TPT Blok RT 006 Dusun Desa
	12.TPT Jalan Asem Dusun
	Winangun
	13.TPT Jalan Cimuncang Dusun
	Desa
	14.TPT Jalan Cipicung Dusun
	Kutasari
	15.TPT Jalan Kubangsari
	16.Reboisasi dan Penanaman
	Lahan Kritis Milik Desa
	17.Pengajian Bulanan Desa
	18.TPT Lapang Voly Dusun
	Randegan
	19.Pembinaan Karang Taruna
	Desa
	20.Pembersihan Drainase Jalan
	Cihelang

				21.Pengembangan dan
				Penguatan Jaringan
				Pemasaran Produk Pertanian
7	NI: NI	Wasi Dala assass	D '4' - D-1-1	
7	Neni Nuraeni	Kasi Pelayanan	Panitia Pelaksana	1. Peningkatan Kapasitas
			Kegiatan	Teknologi Informasi Desa
				Tepat Guna (E-Office)
				2. Rembug Stunting Desa
				3. Peningkatan Kapasitas Kader
				Posyandu
				4. Pembinaan Kinerja Posyandu
				5. Pembinaan TP-PKK Desa
				6. Pelatihan Budidaya Tanaman
				Hidropinik
				7. Budidaya Tanaman Sistem
				Hidroponik
				8. Peningkatan Kapasitas
				Pengelola Kelompok
				Ketahanan Keluarga
				9. Revitalisasi dan Peningkatan
				Kapasitas Pengurus BUMDesa
				10.Penyaluran BLT DD
				11.Insentif Guru PAUD
				12.Insentif Kader Integrasi
				Layanan Primer (ILP)
				13. Tambahan Kesejahteraan
				Guru DTA
				14.Insentif Kader Pembangunan
				Manusia (KPM)
				15.Insentif Kader Posyandu
				16.Insentif Pokja Pokjanal
				Posyandu

	17.Insentif Kader Kesehatan	
	18.Biaya Operasional Kader	
	Untuk Penyelenggaraan	
	Administrasi Posyandu	

KEPALA DESA DAYEUHLUHUR